

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB,
DAN NILAI TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
PADA PERIODE 2004-2013**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama : Dewi Lestari
Nomor Mahasiswa : 13313125
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksudkan dalam buku pedoman penyusunan skripsi program studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan berlaku.”

Yogyakarta, 14 Desember 2017

Penulis



Dewi Lestari

PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB,
DAN NILAI TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA PADA
PERIODE 2003-2014**

Nama : Dewi Lestari
Nomor Mahasiswa : 13313125
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, September 2017

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing


Alhazim Afandi Drs., MA., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB, DAN NILAI
TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA PADA PERIODE 2003-2014**

Disusun Oleh : **DEWI LESTARI**

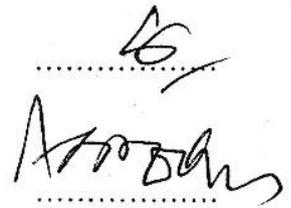
Nomor Mahasiswa : **13313125**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 10 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Alam Nasyroh: 6)

Waktu adalah kehidupan, menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan

(Hasan Al-Bana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada allah SWT, atas rahmat-nya karya ini dapat diselsaikan.

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku kepada mama dan papa tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan kepercayaan,dan kesabaran serta doa yang tulus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunianya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB, DAN NILAI TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA PADA PERIODE 2004-2013. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya menghaturkan ucapan terimakasih kepada :

1. **Papa Wahono dan Mama Boini** yang telah memberikan dukungan berbentuk materi, moral dan doa serta semangat yang tidak ternilai dalam hidup saya.
2. **Abang saya Hermawan dan Muhammad syukri serta adek saya Muhammad yunus** yang telah mendoakan serta memberi semangat kepada saya
3. **Keluarga yang ada di Yogyakarta ibuk niken, pak tono, bunga, enno, cici.** terimakasih atas motivasi dan dukungan serta doa kalian .
4. **Sahabat saya Fathul, Fuji.** Terimakasih sudah memarahi saya untuk lebih giat dalam mengerjakan skripsi serta doa kalian

5. **Bapak Akhsyim Afandi Drs.MA, Ec., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan kesabaran serta perhatiannya dengan memberikan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini
6. **Seluruh Dosen** Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya.
7. **Seluruh Karyawan** Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
8. **Teman-teman angkatan 2013** Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang selalu mensupport dan memotivasi saya dan selalu berbagi dalam situasi apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi kita semua. Aamiin Ya Allah...

Wassalamu'alaikumwarahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Desember 2017

PENULIS

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latarbelakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pengangguran	13
2.2.2 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran	21
2.2.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran	22
2.2.4 Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran	23
2.2.5 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pengangguran	24
2.3 Kerangka Pikir.....	26
2.4 Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Objek Penelitian	29
3.2 Jenis Data	28
3.3 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	29
3.4 Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
1.1 Hasil Penelitian	40
1.1.1 Deskriptif Data Penelitian	40
1.1.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	42
1.1.3 Uji Kesesuaian Model	45
1.1.4 Interpretasi Regresi Data Panel	47
1.1.5 Uji Hipotesis.....	49
1.2 Pembahasan	53
1.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran	53
1.2.2 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran	55
1.2.3 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran	57
1.2.4 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Tingkat Pengangguran	58
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
4.1 Implikasi Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

ABSTRAKSI

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap Negara. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kausalitas, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran. Upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran secara signifikan. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.

Kata Kunci: Pengangguran, Inflasi, Upah minimum, PDRB, Nilai tukar

BAB I

PENDAHULUAN

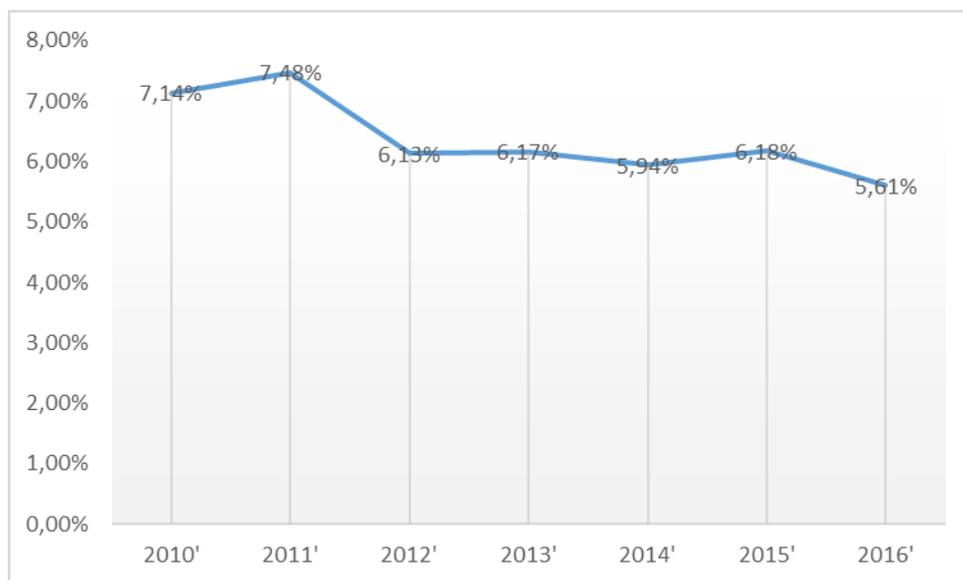
1.1 Latarbelakang Masalah

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap Negara. Menurut Simanjutak (2001), pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Guna mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Ketika pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal

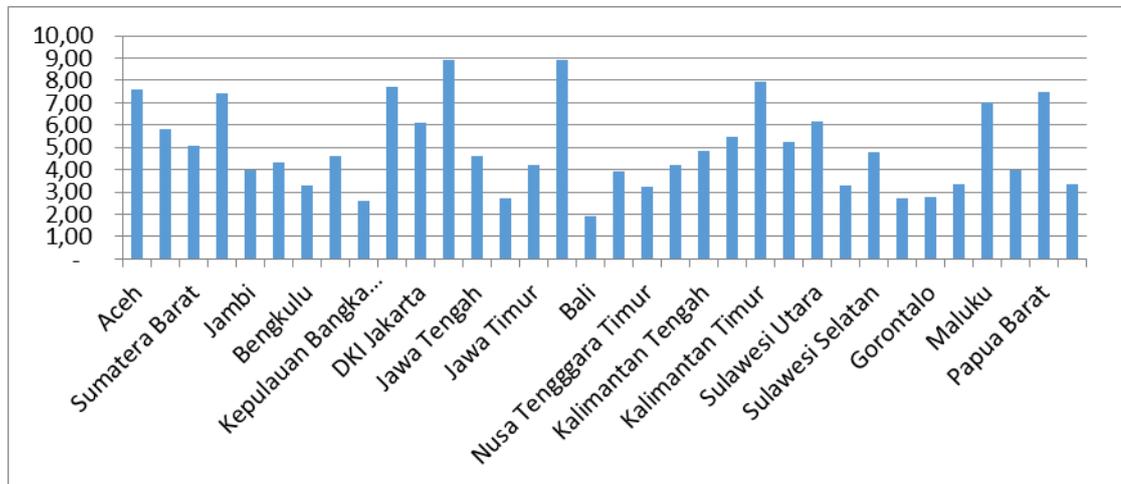
istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh banyak orang.

Sebagai Negara berkembang, permasalahan pengangguran juga dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada periode 2010 sampai 2016 terdapat penurunan jumlah pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Berikut grafik yang menjelaskan penurunan rasio pengangguran terbuka di Indonesia.



Gambar I. 1 Grafik Jumlah Pengangguran Indonesia

Berdasarkan gambar diatas, terlihat dari tahun-ketahun terdapat penurunan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016. Untuk menggambarkan tingkat pengangguran yang ada di setiap provinsi di Indonesia, berikut disajikan grafik yang menjelaskan kondisi tersebut:



Gambar I. 2 Grafik Jumlah Pengangguran Per Provinsi di Indonesia

Dari gambar diatas, diketahui bahwa pada tahun 2016, angka pengangguran tertinggi berada pada provinsi Banten yaitu 8,92 dan disusul Jawa Barat yaitu 8,89. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rasio pengangguran. Menurut Philips dalam Mankiw (2007) inflasi mempunyai hubungan yang negatif terhadap pengangguran. Phillips dalam Mankiw (2007) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satusatunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka pengangguran berkurang.

Selanjutnya, menurut Mankiw (2007), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah juga merupakan kompensasi

yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan. Penetapan upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya pengangguran yang ada. Semakin besar upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Selain inflasi dan upah, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB juga diasumsikan memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran di Indoensia. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kegiatan industri akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, faktor lain juga diasumsikan memiliki pengaruh terhadap pengangguran yaitu nilai tukar. Ketika nilai rupiah

terus melemah maka akan membuat harga bahan baku ataupun barang impor menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013. Judul penelitian yang digunakan adalah **“ANALISIS PENGARUH INFLASI UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB, DAN NILAI TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA PADA PERIODE 2004-2013”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013?
4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013?

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka mencapai kesamaan pengertian dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan batasan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi, upah minimum regional, PDRB, dan nilai tukar. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat pengangguran.
2. Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2004-2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013.
2. Mengetahui pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013.
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013.
4. Mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah kesadaran dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain itu diharapkan penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi pihak perusahaan dan pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang permasalahannya hampir sama atau pun sama dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam membangun kerangka berfikir dalam penelitian, peneliti perlu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Selain itu, riset terdahulu juga berguna untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian Utomo (2013) yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan upah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi analisis berganda dengan pendekatan *time series*. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1980-2010 dan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
2. Penelitian Qomariah (2013) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur”, bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur sehingga nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan kebijakan dalam

mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta *browsing website* internet sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil Estimasi data time series dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur.

3. Penelitian Mentari dan Yasa (2016), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran melalui variabel intervening jumlah investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan didalam penelitian tersebut adalah data *time series* selama lima tahun dari tahun 2009-2013 dan data *cross section* sebanyak sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian tersebut yaitu menggunakan teknik analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat upah dan jumlah investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh secara

tidak langsung dan signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui variabel intervening jumlah investasi.

4. Penelitian Panjawa dan Soebagiyo (2014) yang berjudul “Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran” yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu tingkat pengangguran di Karesidenan Surakarta pada periode 1999-2013. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berbentuk data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013.
5. Penelitian Murniasih, Dunia, Meitriana (2014) yang berjudul “Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2003-2012”, bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh parsial nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (2) pengaruh parsial tingkat upah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (3) pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (4) pengaruh simultan nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pendekatan *time series*. Hasil penelitian yang di peroleh (1) ada pengaruh parsial nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka, (2) ada pengaruh parsial tingkat

upah terhadap tingkat pengangguran terbuka, (3) tidak ada pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka, (4) ada pengaruh simultan nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

6. Penelitian Fariz (2016), yang berjudul “Pengaruh Nilai Tukar, Ekspor dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, nilai ekspor dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan data time series dalam periode 1998-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda (OLS), dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank dan International Financial Statistic (IFS). Hasil analisis dengan menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa upah minimum terhadap tingkat pengangguran berpengaruh negatif secara signifikan, nilai ekspor memiliki pengaruh positif secara signifikan sedangkan variabel nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Tabel 2. 1
Ringkasan Kajian Pustaka

No	Judul/Penulis	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010 (Utomo, 2013)	Dependen: Pengangguran Independen: • Inflasi • Upah	Regresi Linier Berganda	• Upah (+)
2.	Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur (Qomariah, 2013)	Dependen: Pengangguran Independen: • Inflasi, • Pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	• Pertumbuhan ekonomi (-)
3.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali (Mentari dan Yasa, 2016)	Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka Independen: • Pertumbuhan Ekonomi • Upah Minimum	Regresi Data Panel	• Pertumbuhan Ekonomi (-) • Upah Minimum (+)
4.	Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran (Panjawa dan Soebagiyo, 2014)	Dependen: Tingkat Pengangguran Independen: • PDRB • Upah • Jumlah Penduduk • Inflasi	Regresi Data Panel	• PDRB (-) • Upah (+) • Jumlah Penduduk (+)
5.	Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2003-2012 (Murniasih, Dunia, Meitriana, 2014)	Dependen: Tingkat Pengangguran Independen: • PDRB • Upah • Inflasi	Regresi Linier Berganda	• PDRB (+) • Upah (+)
6	Pengaruh Nilai Tukar, Ekspor dan Upah	Dependen: Tingkat	Regresi Linier	• Ekspor (+)

No	Judul/Penulis	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia (Fariz, 2016)	Pengangguran Independen: • Nilai Tukar • Ekspor • Upah	Berganda	• Upah (-)

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengukur tingkat pengangguran dengan menggunakan empat variabel independen yaitu inflasi, upah minimum regional, PDRB, dan nilai tukar dengan menggunakan analisis regresi data panel provinsi di Indonesia pada periode 2004 sampai 2013 yang lebih dapat menjelaskan hasil penelitian dengan lebih luas. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan data *time series*. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan Mentari dan Yasa (2016) tertelak pada variabel independen, yaitu Mentari dan Yasa (2016) hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum, sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu inflasi, upah minimum regional, PDRB, dan nilai tukar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengangguran

2.2.1.1 Pengertian Pengangguran

Pada standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran didefinisikan yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya

(Sukirno, 2000). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidak seimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2007). Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.

Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka (Sukirno, 2000).

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja (McEachern, 2000). Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan

mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun (Sukirno, 2000). Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi (Sukirno, 2000). Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

2.2.1.2 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Teori Klasik

Pandangan dari Teori Klasik bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (supply). Pandangan Klasik juga berpandangan bahwa pengangguran terjadi dikarenakan mis-alokasi sumber daya yang sifatnya sementara kemudian dapat diatasi melalui mekanisme pasar (Gilarso, 2004).

2. Teori Keynes

Teori Keynes menyatakan bahwa berlawanan dengan Teori Klasik, karena Keynes berpendapat bahwa masalah dari pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya

produksi tetapi rendahnya konsumsi. Keynes berpendapat bahwa hal ini tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan, karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Selain itu, pada kenyataannya upah cenderung sulit untuk mengalami penurunan. Sehingga Teori Keynes dianggap tidak tepat.

3. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus dalam buku *Ekonomi Sumber Daya* (Mulyadi, 2014) menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur (*geometric progression*, dari 2 ke 4,8,16,32 dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (*arithmetic progression*, dari 2 ke 4,6,8 dan seterusnya). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, maka Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka yang akan menimpa umat manusia.

Apabila dijelaskan secara rinci teori Malthus menyatakan bahwa penduduk cenderung bertambah secara tak terbatas sampai mencapai batas persediaan makanan, dan permasalahan ini menimbulkan manusia saling

bersaing dengan adanya persaingan ini maka akan ada manusia yang tersisih dan tidak mampu memperoleh makanan. Penjelasan tersebut bisa diartikan semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula, dan hal ini tak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia. Dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sedikit maka angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran. Dapat dikatakan bahwa teori Malthus dapat digunakan dalam menganalisis masalah pengangguran.

2.2.1.3 Jenis-jenis Pengangguran

Sukirno (2000) mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

4. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

2.2.1.4 Pengangguran Terbuka

Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja (Sukirno, 2000). Untuk

melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari Tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severely underemployment*)

bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

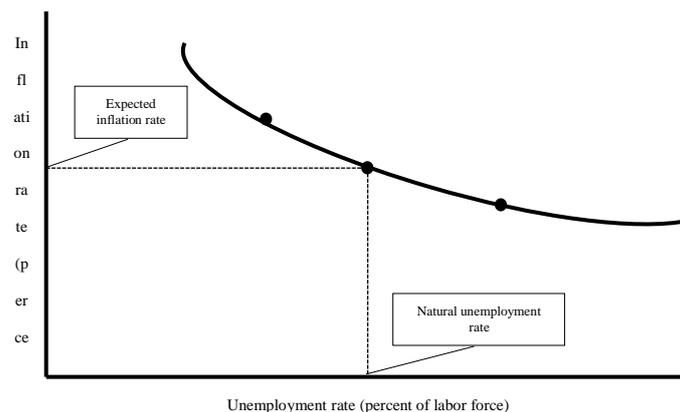
Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industri telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang (Kuncoro, 2006).

Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, mereka bersedia

berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup.

2.2.2 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran

Hubungan terbalik (*tradeoff*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi (Dornbusch, Fisher, Startz, 2008). Berikut gambar dari kurva phillips:



Gambar II. 1 Kurva Phillips

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga

kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

2.2.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Tingkat upah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengangguran, dikarenakan upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*" yang berarti bahwa orang bekerja akan mendapat pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam eksploitasi tenaga kerja terutama *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, 1998).

Hubungan antara tingkat upah dengan pengangguran juga dapat dijelaskan melalui kurva Phillips. Kurva Phillips menjelaskan adanya hubungan terbalik (*tradeoff*) antara inflasi dan pengangguran. Ketika terjadi kenaikan inflasi, harga-harga yang naik akan mendorong naiknya tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini akan mendorong produsen melakukan efisiensi terhadap industrinya, seperti merasionalisasikan tenaga kerja dan restrukturisasi atau melakukan perampingan organisasi perusahaannya yang berakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Penawaran tenaga kerja kian bertambah sedangkan permintaan terhadap tenaga kerja kian berkurang. Tenaga kerja yang menganggur atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa harus mau

menerima upah atau gaji yang rendah yang tidak jarang pula lebih rendah nilainya dari pada harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Di pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan menyebabkan meningkatkan pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat upah akan naik jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencarian kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula tenaga kerja akan meningkat.

2.2.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran

Menurut Todaro (2000) pembangunan ekonomi mengisyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Sehingga secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB atau di Indonesia sendiri dapat diukur dengan PDRB yang dihasilkan suatu daerah atau disebut dengan PDRB, karena salah satu indikator yang berhubungan dengan jumlah angka tenaga kerja adalah PDRB. Beberapa negara memiliki hubungan positif antara PDRB dengan angka pengangguran namun ada juga yang berhubungan negatif. Hubungan yang positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak di iringi oleh peningkatan kapasitas produksi sehingga tidak adanya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hubungan negatif

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun di iringi peningkatan peluang kerja karena orientasi yang lebih pada padat karya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang akan membantu mengurangi angka pengangguran.

Hubungan PDRB dengan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui hukum Okun. Output dapat diilustrasikan sebagai salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Suatu periode dimana output lebih tinggi dari titik potensialnya, maka akan tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak. Pada kondisi ini, pengangguran akan dapat ditekan atau bahkan akan menurun. Arthur Okun memberikan definisinya melalui Hukum Okun yang mengatakan bahwa untuk setiap 2 persen penurunan pendapatan nasional secara relatif terhadap GNP potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.2.5 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pengangguran

Nilai tukar (*exchange rate*) valuta asing dapat dinilai sebagai harga salah satu mata uang yang dinyatakan menurut mata uang lainnya (*Eiteman, Stonehill, dan Moffet, 2003*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain. Dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan juga

meningkatkan suku bunga. Walaupun menurunnya nilai tukar juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan ekspor (Nugroho, 2008).

Pendapat lain menambahkan bahwa nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Kenaikan harga valuta asing disebut depresiasi atas mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valuta asing disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang luar negeri (*foreign exchange market*) (Manurung dan Manurung, 2009).

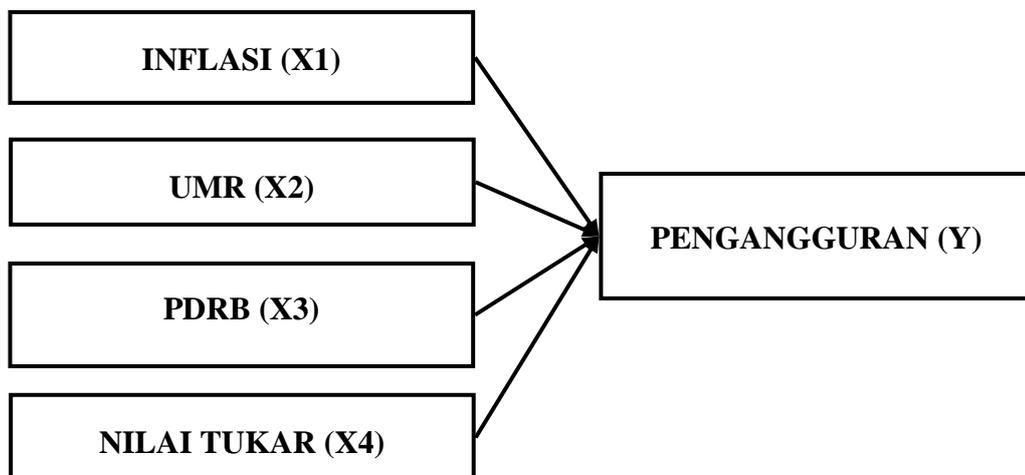
Teori mengenai nilai tukar dapat dijelaskan melalui model Mundell-Fleming yang merupakan versi perekonomian terbuka dari model IS-LM. Kedua model tersebut menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, serta mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian. Model Mundell-Fleming merupakan model yang memadukan antara keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan antara pasar barang (IS), pasar uang (LM). Sementara itu keseimbangan eksternal ditunjukkan oleh keseimbangan neraca pembayaran.

Berdasarkan landasan teori, dapat dipahami bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga bahan baku

ataupun barang impor menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan landasan teori, variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi dan upah minimum regional. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana dapat dijelaskan melalui skema berikut:



Gambar II. 2 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui kurva Phillips yang mengatakan bahwa terdapat hubungan terbalik

(*tradeoff*) antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka pengangguran berkurang.

H1: Terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran.

2.4.2 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran

Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Pada saat dilakukannya peningkatan upah, pihak perusahaan akan mengalami peningkatan biaya produksi. Kondisi ini akan mendorong produsen melakukan efisiensi terhadap industrinya, seperti merasionalisasikan tenaga kerja dan restrukturisasi atau melakukan perampingan organisasi perusahaannya yang berakibatkan semakin sedikit pula jumlah tenaga kerja yang bekerja. Hal ini secara umum akan meningkatkan jumlah pengangguran.

H2: Terdapat pengaruh positif tingkat upah terhadap tingkat pengangguran.

2.4.3 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran

Hubungan PDRB dengan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui hukum Okun. Arthur Okun memberikan definisinya melalui Hukum Okun yang mengatakan bahwa untuk setiap 2 persen penurunan pendapatan nasional secara

relatif maka tingkat pengangguran akan naik satu persen. Pada saat terjadi kenaikan pendapatan nasional yang diukur dengan PDRB, kondisi tersebut merupakan proyeksi dari adanya peningkatan keseimbangan dipasar barang. Ketika permintaan agregat mengalami kenaikan, kondisi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah pekerja yang dimiliki untuk memenuhi kenaikan permintaan agregat tersebut. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan PDRB akan mengurangi jumlah pengangguran.

H3: Terdapat pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat pengangguran.

2.4.4 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan landasan teori, dapat dipahami bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Pada saat terjadi kenaikan nilai tukar rupiah, hal tersebut akan mendorong naik permintaan barang oleh masyarakat. Naiknya permintaan barang akan direspon oleh perusahaan dengan meningkatkan jumlah penawaran barang tersebut. Kondisi ini akan meningkatkan keseimbangan di pasar barang dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan jumlah pengangguran.

H4: Terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder secara keseluruhan diambil dari sumber resmi dalam bentuk tahunan pada periode 2004 sampai 2013. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan kriteria yaitu provinsi yang menerbitkan laporan mengenai tingkat pengangguran, inflasi, upah minimum regional, PDRB dan nilai tukar pada periode 2004-2013. Berdasarkan hal tersebut, jumlah provinsi yang digunakan pada penelitian ini adalah 33 provinsi. Data tingkat pengangguran, inflasi, upah minimum regional, dan PDRB diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) sedangkan data nilai tukar akan diambil dari situs id.investing.com.

3.2 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengangguran, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah inflasi, upah minimum regional, PDRB, dan nilai tukar.

2. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka masing-masing variabel dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional yang meliputi:

- a. Pengangguran: Data tingkat pengangguran terdidik akan disajikan dalam bentuk persen (%) yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Inflasi: Data inflasi akan disajikan dalam bentuk persen (%) yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (BI).
- c. Upah minimum regional: Data tingkat upah akan disajikan dalam bentuk rupiah (Rp) yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tingkat upah tersebut akan dirubah kedalam bentuk Logaritma Natural (ln).
- d. PDRB: Data tingkat PDRB akan disajikan dalam bentuk rupiah (Rp) yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data PDRB tersebut akan dirubah kedalam bentuk Logaritma Natural (ln).
- e. Nilai Tukar: Data tingkat nilai tukar akan disajikan dalam bentuk rupiah (Rp/US\$) yang diperoleh dari situs id.investing.com. Data tingkat upah tersebut akan dirubah kedalam bentuk Logaritma Natural (ln).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab seluruh tujuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel

merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (Widiarjono, 2007).

Model hubungan kinerja dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{it} = b_0 + b_1 \cdot INF_{it} + b_2 \cdot UMR_{it} + b_3 \cdot PDRB_{it} + b_4 \cdot NT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y	= Pengangguran
b ₀	= Konstanta
INF	= Inflasi
UMR	= Upah Minimum Regional
PDRB	= PDRB
NT	= Nilai Tukar
b _{1,2,3,4}	= Koefisien Regresi
e	= Error
i	= Jumlah Provinsi
t	= Periode Waktu

Gujarati (2003) mengemukakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh data panel dibanding data *time series* atau *cross section*, yaitu:

1. Teknik estimasi menggunakan data panel akan menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual secara lebih spesifik.
2. Mengkombinasikan pengamatan *time series* dan *cross section* akan memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antar variabel bebas, memberikan lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien.
3. Data panel lebih cocok digunakan jika akan melakukan studi tentang perubahan dinamis.

4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data *time series* atau *cross section*.
5. Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias.

Kelebihan utama dari penggunaan data panel yakni penulis akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan model terhadap perbedaan perilaku diantara tiap-tiap individu (Greene, 2003).

1. Estimasi Model Data Panel

Adapun pemodelan data panel terbagi menjadi tiga yakni: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*:

a. Common Effect

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series* sebagaimana telah dipelajari sebelumnya. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan OLS.

b. Fixed Effect

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan

waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut.

c. *Random Effect*

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dengan data *time series*.

Dasar pemilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* menurut Gujarati (2004) adalah sebagai berikut:

- a. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah data dari *cross section*) ($T > N$) kecil, maka akan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai parameter yang diestimasi oleh *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan kemudahan penghitungan sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik.
- b. Ketika N besar dan T kecil ($T < N$), estimasi yang diperoleh dari kedua metode akan memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak maka *Random Effect Model* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *Fixed Effect Model*.

- c. Jika komponen *error* individual berkorelasi dengan variabel independen X maka parameter yang diperoleh dengan *Random Effect Model* akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan *Fixed Effect Model* tidak bias.
- d. Apabila N besar dan T kecil ($N > T$), dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *Random Effect Model* akan lebih efisien dari *Fixed Effect Model*.

2. Uji Kesesuaian Model

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Chow Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square Model* atau *Fixed Effect Model*.
- b. LM test (The Breush–Pagan LM Test) digunakan sebagai dasar pertimbangan statistik dalam memilih model *random effect* dan *pooled least square*.
- c. Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan metode data panel seperti yang disebutkan oleh Wibisono (2005) antara lain:

- a. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

- b. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- c. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- d. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Wibisono, 2005).

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian tersebut meliputi uji t statistik, uji f statistik dan analisis koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Koefisien Secara Individual (Uji t)

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

1) Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran.

2) Pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran.

3) Pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_3 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat pengangguran.

4) Pengaruh Nilai Tukar terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_4 = 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_4 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung $<$ t tabel maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2008) uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum. F statistik yang signifikan lebih besar dari F tabel pada tingkat resiko kesalahan (α) yang diambil. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dengan one tail, yaitu sebagai berikut :

$H_0 : b_0=b_5 = 0$ Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel inflasi, upah, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

H1 : $b_0=b_5 \neq 0$ Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel inflasi, upah, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

Uji F statistik ini dalam analisis regresi dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi (R^2). Nilai F statistik dengan demikian dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa apakah tidak ada variabel independen yang menjelaskan variasi Y di sekitar rata-ratanya dengan derajat kepercayaan (*degree of freedom*) k-1 dan n-1 tertentu. Jika F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2003). Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin Besar R^2 , maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan variabel bebas semakin tinggi dan semakin kecil R^2 , maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 sama dengan 1, berarti garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Sebaliknya, kalau R^2 sama dengan

0 maka model tadi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Khususnya R^2 terletak antara kedua titik ekstrim ini (0 – 1). Kecocokan model dikatakan lebih baik bila R^2 semakin dekat dengan 1 (Gujarati, 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu inflasi, tingkat upah minimum (UMR), PDRB, nilai tukar dan 1 variabel dependen yaitu tingkat pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder secara keseluruhan diambil dari sumber resmi dalam bentuk tahunan pada periode 2004 sampai 2013. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan kriteria yaitu provinsi yang menerbitkan laporan mengenai tingkat pengangguran, inflasi, tingkat upah, pdrb, dan nilai tukar pada periode 2004-2013. Berdasarkan hal tersebut, jumlah provinsi yang digunakan pada penelitian ini adalah 33 provinsi.

Tabel 4. 1
Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Pengangguran	7,60	6,85	3,28	1,83	18,91
Inflasi	7,36	6,60	3,99	2,41	17,11
UMR	819.083,24	770.000,00	301.962,27	310.000,00	2.200.000,00
PDRB	140.311,26	51.460,18	219.528,41	2.368,87	1.255.925,78
Nilai_Tukar	9.770,92	9.409,00	962,22	8.993,50	12.170,00

Sumber: Olahdata (2017)

Berdasarkan data pada tabel 4.1. di atas, data tingkat pengangguran diperoleh nilai mean sebesar 7,60% dengan nilai median 6,85%. Nilai minimum 1,83% dan nilai maksimum 18,91%. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data tingkat pengangguran di Indonesia berada pada kondisi stabil karena

selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,28% yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data tingkat pengangguran adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data inflasi diperoleh nilai mean sebesar 7,36% dengan nilai median 6,60%. Nilai minimum 2,41% dan nilai maksimum 17,11%. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data inflas di Indonesia berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,99% yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data inflasi adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data upah minimum regional diperoleh nilai mean sebesar Rp 819.083,24 dengan nilai median Rp 770.000,00. Nilai minimum Rp 310.000,00 dan nilai maksimum Rp 2.200.000,00. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi upah minimum regional di Indonesia berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp 301.962,27 yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data upah minimum regional di Indonesia adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data PDRB diperoleh nilai mean sebesar Rp 140.311,26 dengan nilai median Rp 51.460,18. Nilai minimum Rp 2.368,87 dan nilai maksimum Rp 1.255.925,78. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi PDRB di Indonesia berada pada kondisi tidak stabil karena selisih nilai antara mean dan

median terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp 219.528,41 yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data PDRB di Indonesia adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data nilai tukar diperoleh nilai mean sebesar Rp 9.770,92 dengan nilai median Rp 9.409,00. Nilai minimum Rp 8.993,50 dan nilai maksimum Rp 12.170,00. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi nilai tukar di Indonesia berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp 962,22 yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data nilai tukar di Indonesia adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

1.1.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi model yang digunakan adalah regresi data panel yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*:

1. *Common Effect*

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode OLS (estimasi *common effect*). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan data perilaku antar individu sama dengan kurun waktu. Berikut adalah hasil dari estimasi model *common effect*:

Tabel 4. 2
Hasil Estimasi *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	116,201	17,221	6,748	0,000
INF?	0,313	0,053	5,896	0,000
LN_UMR?	-1,112	0,573	-1,942	0,053
LN_PDRB?	0,672	0,119	5,629	0,000
LN_NTKAR?	-11,236	2,234	-5,028	0,000
R-squared				0,251
Adjusted R-squared				0,242
F-statistic				26,771
Prob(F-statistic)				0,000

Sumber: Olahdata (2017)

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua variabel pada model *common effect* yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas semua variabel yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5%.

2. *Fixed Effect*

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Asumsi dalam metode ini terdapat perbedaan intersep antar objek namun intersep antar waktu adalah sama. Metode ini juga mengansumsikan bahwa *slop*-nya sama antar objek maupun antar waktunya. maka ditambahkan generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu. Berikut adalah hasil estimasi dari model *fixed effect*:

Tabel 4. 3
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74,578	7,731	9,646	0,000
INF?	0,134	0,025	5,444	0,000
LN_UMR?	0,238	0,817	0,291	0,771
LN_PDRB?	-3,378	0,593	-5,693	0,000
LN_NTKAR?	-3,718	1,038	-3,582	0,000
R-squared				0,883
Adjusted R-squared				0,868
F-statistic				60,107
Prob(F-statistic)				0,000

Sumber: Olahdata (2017)

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hampir semua variabel pada model *fixed effect* yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hanya variabel UMR saja yang tidak signifikan karena memiliki nilai signifikansi diatas 5%.

3. *Random Effect*

Data panel dengan *fixed effects* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai metode *random effects*. Di dalam model ini, akan dipilih estimasi data panel di mana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam metode ini, suatu perbedaan intersep antar obyek dan antar waktu yang mungkin terjadi akan dimasukkan ke dalam *error* pada suatu model OLS, sehingga model akan efisien. Parameter-parameter yang berbeda antar objek maupun antar waktu juga akan dimasukkan ke dalam *error*. Karena hal ini, model efek acak sering juga disebut model komponen *error* (*error component model*). Berikut adalah hasil estimasi dari model *random effect*:

Tabel 4. 4
Hasil Estimasi *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	89.281	7.391	12.080	0.000
INF?	0.128	0.024	5.251	0.000
LN_UMR?	-3.615	0.460	-7.852	0.000
LN_PDRB?	-0.237	0.274	-0.866	0.387
LN_NTKAR?	-3.380	1.027	-3.290	0.001
R-squared				0.609
Adjusted R-squared				0.604
F-statistic				124.303
Prob(F-statistic)				0.000

Sumber: Olahdata (2017)

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hampir semua variabel pada model *random effect* yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hanya variabel PDRB saja yang tidak signifikan karena memiliki nilai signifikansi diatas 5%.

1.1.3 Uji Kesesuaian Model

1. Chow Test dan LM Test

Berikut adalah hasil pengujian Chow Test dan LM Test:

Tabel 4. 5
Hasil Pengujian Chow Test dan LM Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	48,372	-32,287	0,000
Cross-section Chi-square	601,104	32	0,000

Sumber: Olahdata (2017)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa pada pengujian Chow Test, model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section* F bernilai $0,00 < 0,05$, sedangkan pada pengujian LM Test, diketahui model digunakan adalah model *random*

effect. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section Chi-square* bernilai $0,00 < 0,05$.

2. Hausman Test

Berikut adalah hasil pengujian Hausman Test:

Tabel 4. 6
Hasil Pengujian Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51,697	4	0,000

Sumber: Olahdata (2017)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa pada pengujian Hausman Test, model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section random* bernilai $0,009 < 0,05$. Dari hasil pengujian Chow Test, LM Test, dan Hausman Test, dapat diketahui bahwa model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Berikut adalah hasil estimasi lengkap dari model *fixed effect*.

Tabel 4. 7
Hasil Estimasi Fixed Effect

Variable	Coeff	Std, Er	t-Stat	Prob,	Variable	Coeff	Std, Er	t-Stat	Prob,
C	74,578	7,731	9,646	0,000	NTB	-2,375			
INF?	0,134	0,025	5,444	0,000	NTT	-6,981			
LN_UMR?	0,238	0,817	0,291	0,771	Kalbar	-2,122			
LN_PDRB?	-3,378	0,593	-5,693	0,000	Kalteng	-4,836			
LN_NTKAR?	-3,718	1,038	-3,582	0,000	Kalsel	-1,929			
Aceh	3,027				Kaltim	8,333			
Sumut	5,973				Sulut	0,899			
Sumbar	2,392				Sulteng	-3,548			
Riau	6,385				Sulsel	4,067			
Jambi	-2,933				Sultra	-4,368			
Sumsel	3,058				Gorontalo	-7,841			
Bengkulu	-6,813				Sulbar	-9,473			
Lampung	0,411				Maluku	-3,500			
Kep Bangka	-5,035				Malut	-9,756			
Kep Riau	0,618				Papbar	-3,463			
DKI	12,719				Papua	-2,536			
Jabar	12,340				R-sq				0,883
Jateng	5,977				Ad R-sq				0,868
DIY	-3,427				F-statistic				60,107
Jatim	6,690				Prob F				0,000
Banten	9,755								
Bali	-4,172								

Sumber: Olahdata (2017)

1.1.4 Interpretasi Regresi Data Panel

Dari hasil uji data panel dengan model *fixed effect* dihasilkan persamaan

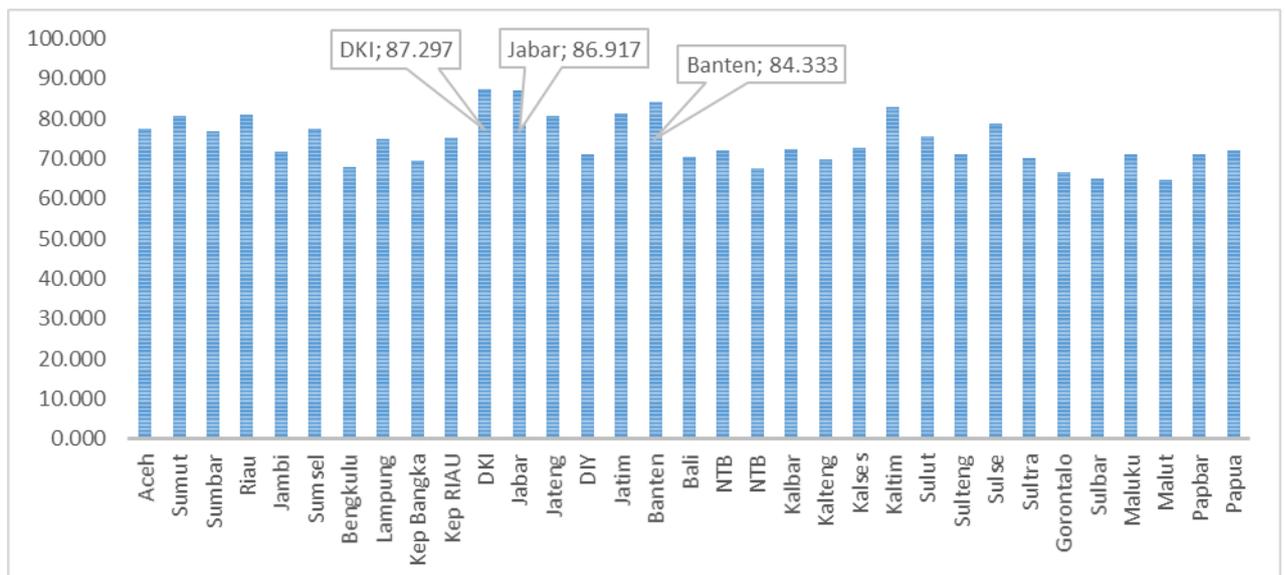
berikut:

$$\text{PENGANGGURAN}_{it} = 74,578 + 0,134 * \text{INF}_{it} + 0,238 * \text{LN_UMR}_{it} - 3,378 * \text{LN_PDRB}_{it} - 3,718 * \text{LN_NTKAR}_{it}$$

Tabel 4. 8
Interpretasi Hasil

Provinsi	Persamaan			Provinsi	Persamaan		
C			74.578	Bali	-4.172	+ 74.578	= 70.406
Aceh	3.027	+ 74.578	= 77.605	NTB	-2.375	+ 74.578	= 72.203
Sumut	5.973	+ 74.578	= 80.550	NTT	-6.981	+ 74.578	= 67.597
Sumbar	2.392	+ 74.578	= 76.969	Kalbar	-2.122	+ 74.578	= 72.456
Riau	6.385	+ 74.578	= 80.963	Kalteng	-4.836	+ 74.578	= 69.741
Jambi	-2.933	+ 74.578	= 71.644	Kalses	-1.929	+ 74.578	= 72.648
Sumsel	3.058	+ 74.578	= 77.636	Kaltim	8.333	+ 74.578	= 82.910
Bengkulu	-6.813	+ 74.578	= 67.765	Sulut	0.899	+ 74.578	= 75.476
Lampung	0.411	+ 74.578	= 74.988	Sulteng	-3.548	+ 74.578	= 71.030
Kep Bangka	-5.035	+ 74.578	= 69.542	Sulsel	4.067	+ 74.578	= 78.645
Kep RIAU	0.618	+ 74.578	= 75.196	Sultra	-4.368	+ 74.578	= 70.209
DKI	12.719	+ 74.578	= 87.297	Gorontalo	-7.841	+ 74.578	= 66.736
Jabar	12.34	+ 74.578	= 86.917	Sulbar	-9.473	+ 74.578	= 65.105
Jateng	5.977	+ 74.578	= 80.555	Maluku	-3.5	+ 74.578	= 71.077
DIY	-3.427	+ 74.578	= 71.150	Malut	-9.756	+ 74.578	= 64.822
Jatim	6.69	+ 74.578	= 81.267	Papbar	-3.463	+ 74.578	= 71.115
Banten	9.755	+ 74.578	= 84.333	Papua	-2.536	+ 74.578	= 72.041

Sumber: Olahdata (2017)



Sumber: Olahdata (2017)

Gambar IV. 1 Interpretasi Hasil

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa pengangguran tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta yang disusul oleh provinsi Jawa Barat dan Banten. Angka konstanta menunjukkan nilai sebesar 74,578 yang berarti bahwa apabila variabel inflasi, tingkat upah minimum regional, PDRB, dan nilai tukar tidak ada atau sama dengan nol maka nilai rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia memiliki nilai positif sebesar 74,578. Koefisien inflasi (α_1) menunjukkan angka 0,134 yang berarti apabila nilai inflasi naik 1 persen, maka akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0,134 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Koefisien upah minimum regional (α_2) menunjukkan nilai 0,238 yang artinya apabila tingkat upah minimum naik Rp 1.000, maka akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0,238 dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

Selanjutnya koefisien PDRB (α_3) menunjukkan nilai -3,378 yang berarti apabila PDRB naik Rp 1.000, maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 3,378 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Koefisien nilai tukar (α_4) menunjukkan nilai -3,718 artinya apabila nilai tukar naik Rp 1.000, maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 3,718 dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

1.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Secara Individual (Uji t)

- a. Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_1= 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Apabila angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai koefisien sebesar 0,134 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran sebesar 0,134.

b. Pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Apabila angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai koefisien sebesar 0,238 dengan sig. t sebesar 0,771 ($p > 0,05$), artinya bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah

minimum regional nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran sebesar 0,238.

c. Pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_3 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat pengangguran.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Apabila angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai koefisien sebesar -3,378 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran sebesar 3,378.

d. Pengaruh Nilai Tukar terhadap tingkat pengangguran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: b_0=b_4 = 0$ Tidak terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

$H_1: b_0=b_4 \neq 0$ Terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap tingkat pengangguran.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Apabila angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai koefisien sebesar -3,718 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran sebesar 3,718.

2. Uji Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Nilai F sebesar 60,107 dan memiliki nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Mengingat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 5% maka disimpulkan terdapat pengaruh simultan dari variabel inflasi, tingkat upah minimum, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2004-2013.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,883 atau sebesar 88,3%. Hal ini berarti kontribusi variabel inflasi, tingkat upah minimum, PDRB, dan nilai tukar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran adalah sebesar 88,3%. Sedangkan sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh varian lain di luar model penelitian.

1.2 Pembahasan

1.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2004-2013 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,134 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ini berarti apabila terjadi kenaikan inflasi, maka akan meningkatkan pengangguran di Indonesia sebesar 0,134, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat inflasi maka juga akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 0,134.

Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis dikarenakan inflasi yang terjadi tidak hanya menyebabkan peningkatan harga barang-barang dalam jangka waktu yang lama, namun juga menyebabkan adanya penurunan kemampuan beli masyarakat. Hal ini jika terus berlanjut, maka akan mengakibatkan pada produsen mengalami kerugian. Guna mengatasi kerugian tersebut, para produsen terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, sehingga pengangguran akan meningkat. Kondisi ketika terjadi kenaikan inflasi bersamaan dengan adanya peningkatan jumlah pengangguran disebut dengan stagflasi.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi sekaligus menurunkan angka

pengangguran di Indonesia dikarenakan hasil penelitian ini menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengerahkan dana masyarakat. Hal ini disebabkan, karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2008). Karakteristiknya yang mencerminkan kenaikan harga yang menyeluruh menjadikannya termasuk ke dalam klasifikasi variabel makroekonomi dan dijadikan indikator stabilitas harga karena hubungannya yang selalu dikaitkan dengan moneter agregat (Zeman dan Jurca, 2008).

Secara umum, pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa. Besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2013), Qomariah (2013), Panjawa dan Soebagiyo (2014), dan Murniasih, Dunia, Meitriana (2014) yang menemukan bahwa inflasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran.

1.2.2 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2004-2013 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,238 dengan sig. t sebesar 0,771 ($p > 0,05$), artinya bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan tingkat upah minimum maka akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,238 namun dampak yang diberikan tidak signifikan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat upah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,238 namun tidak signifikan .

Tidak signifikannya pengaruh yang diberikan oleh tingkat upah minimum terhadap pengangguran diakibatkan oleh mayoritas pekerja di Indonesia bekerja pada sektor informal, sehingga adanya kebijakan kenaikan tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak serta merta mendorong kenaikan upah secara langsung pada sektor tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang bergerak di sektor informal tersebut tidak perlu melakukan PHK terhadap pekerjaannya dikarenakan perusahaan sektor informal tidak mengalami peningkatan biaya produksi.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan kebijakan untuk melakukan peningkatan tingkat upah minimum disetiap regional. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini dalam Indriastuti, 2013).

Hubungan antara upah dan pengangguran dikemukakan oleh (Kaufman dan Hotchkiss dalam Dewi 2010). Problem yang langsung menyentuh kaum buruh atau pekerja adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima kecil. Upah itu merupakan unsur terpenting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja karena upah menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa sandang, pangan, perumahan maupun kebutuhan lain. Seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut sehingga menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur, Engka, dan Temengkeng (2014)

dan Alif (2014) yang menemukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

1.2.3 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2004-2013 menunjukkan nilai koefisien sebesar -3,378 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti apabila terdapat peningkatan PDRB maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 3,378 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan PDRB maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 3,378. Dampak negatif tingkat upah minimum terhadap pengangguran sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kegiatan industri akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah dapat mendorong tumbuhnya UMKM dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini dilakukan agar setiap daerah dapat meningkatkan PDRB sekaligus menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran.

Menurut Sadono Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan

gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut BPS (2007), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

1.2.4 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2004-2013 menunjukkan nilai koefisien sebesar -3,718 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), artinya bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti apabila terdapat peningkatan nilai tukar terhadap rupiah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 3,718, dan sebaliknya apabila terdapat penurunan angka nilai tukar rupiah maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 3,718.

Dampak negatif nilai tukar terhadap pengangguran diasumsikan terjadi karena pada saat nilai tukar rupiah semakin melemah, maka akan meningkatkan harga akan produk-produk dari luar negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat

mencoba mencari alternatif produk yang berasal dari produsen dalam negeri, sehingga permintaan produk dalam negeri akan meningkat. Guna memenuhi permintaan tersebut, pihak produsen akan menambah jumlah tenaga kerja.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah, pemerintah di Indonesia diharapkan dapat menentukan prioritas utama terlebih dahulu antara menguatkan nilai rupiah atau menurunkan angka pengangguran. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat rasio pengangguran di Indonesia.

Dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan juga meningkatkan suku bunga. Walaupun menurunnya nilai tukar juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan ekspor (Nugroho, 2008). Pendapat lain menambahkan bahwa nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Kenaikan harga valuta asing disebut depresiasi atas mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valuta asing disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang luar negeri (*foreign exchange market*) (Manurung dan Manurung, 2009).

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan penawaran atau permintaan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valuta asing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya, maka akan dilakukan penjatahan valuta asing (Halwani, 2005).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah hendaknya dapat menentukan prioritas yang tepat antara meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar, atau mencoba mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah dapat berdampak buruk bagi perdagangan di Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1 Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran.
- 2 Upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran secara signifikan.
- 3 PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.
- 4 Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.

4.1 Implikasi Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan, maka implikasi hasil penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Indonesia, diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini perlu

dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi sekaligus menurunkan angka pengangguran di Indonesia dikarenakan hasil penelitian ini menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

2. Kepada pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan kebijakan untuk melakukan peningkatan tingkat upah minimum disetiap regional. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
3. Diharapkan pemerintah dapat mendorong tumbuhnya UMKM dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini dilakukan agar setiap daerah dapat meningkatkan PDRB sekaligus menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran.
4. Berkaitan dengan kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah, pemerintah di Indonesia diharapkan dapat menentukan prioritas utama terlebih dahulu antara menguatkan nilai rupiah atau menurunkan angka pengangguran. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat rasio pengangguran di Indonesia.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel mikro dan makro lainnya dalam menjelaskan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Faldi. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran di DKI Jakarta Tahun 1997-2012. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ananta, A. (1990). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Lembaga Demografi LPFEUI.
- BPS. Konsep Kenagakerjaan dan Kependudukan. www.bps.go.id/diakses:26 Desember 2016
- Dewi, Agustina Mustika Candra. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas di Ponegoro.
- Dornbusch, Rudiger., Stanley Fischer., dan Richard Startz. (2004). *Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Downes, J dan J E. Goodman. (1995). *Dictionary of Finance and Investment Terms*. New York: Barron's Educational Series.
- Gilarso, T. SJ. (2003). *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Greene, W. H. 2003. *Econometric Analysis* 5th edition. New Jersey: Pearson Education International.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*, Edisi Kelima, alih bahasa Zain Sumarno. Jakarta: Erlangga
- Kaufman, B E dan J L. Hotchkiss. (1999). *The Economics of Labor Markets*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusnaini, D. 1998. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Machfudz, M dan M N Sujoni. (2012). *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Mankiw, N. G. (2007). *Teori Makro Ekonomi*. Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mansur, Nirmala; Daisy Engka; dan Steeva Tumangkeng. (2014). Analisis Upah Terhadap Pengangguran Di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 No 2.
- Manurung, J., dan A. H. Manurung., (2009) *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat.
- McEachern, W A. (2000). *Ekonomi Makro, pendekatan kontemporer*”, terjemahan: Sigit Triandaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Mentari dan Yasa. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol 5, No 6.
- Murniasih, Dunia, Meitriana. (2014). Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2003-2012. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*. Vol 4, No 1.
- Panjawa, J L., D Soebagiyo. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 15, No 1.
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qomariyah, I. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol 1, No 3.
- Rahardja, P dan M Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rizka, F K. (2007). Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia. *Skripsi* Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang.
- Samuelson, P A., dan W D. Nordhaus. (2004). *Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi tujuh belas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Simanjuntak, P, J. (2001). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Situmorang, S H. (2004). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. Medan: USU Press

- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjiptoherijanto, P. (1990). *Kebijakan Upah dan Industrialisasi*
- Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Utomo, F.W. (2013). Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Wibisono, Yusuf 2005. *Metode Statistika*. Yogyakarta: BPFE. UGM.
- Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Zeman, J dan P Jurca. (2008). Macro Stress Testing of the Slovak Banking Sector. *Working Paper 1 National Bank of Slovakia*. ISSN: 1337-5830.

LAMPIRAN

DATA PENELITIAN

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
1	Aceh	2004	9,35	6,4	Rp 550.000	Rp 50.357.000.000.000	Rp 9.283
		2005	14	17,11	Rp 620.000	Rp 56.952.000.000.000	Rp 9.830
		2006	10,43	6,6	Rp 820.000	Rp 70.787.000.000.000	Rp 8.994
		2007	9,84	6,59	Rp 850.000	Rp 71.093.000.000.000	Rp 9.393
		2008	9,56	11,06	Rp 1.000.000	Rp 73.548.000.000.000	Rp 10.900
		2009	8,71	2,41	Rp 1.200.000	Rp 71.987.000.000.000	Rp 9.425
		2010	8,37	6,96	Rp 1.300.000	Rp 79.145.000.000.000	Rp 9.010
		2011	9	3,79	Rp 1.350.000	Rp 87.530.000.000.000	Rp 9.068
		2012	9,06	4,32	Rp 1.400.000	Rp 95.074.000.000.000	Rp 9.638
		2013	10,12	8,38	Rp 1.550.000	Rp 103.046.000.000.000	Rp 12.170
2	Sumatera Utara	2004	11,08	6,4	Rp 537.000	Rp 118.101.000.000.000	Rp 9.283
		2005	11,9	17,11	Rp 600.000	Rp 139.618.000.000.000	Rp 9.830
		2006	11,51	6,6	Rp 737.794	Rp 160.377.000.000.000	Rp 8.994
		2007	10,1	6,59	Rp 761.000	Rp 181.820.000.000.000	Rp 9.393
		2008	9,1	11,06	Rp 822.205	Rp 213.932.000.000.000	Rp 10.900
		2009	8,45	2,41	Rp 905.000	Rp 236.354.000.000.000	Rp 9.425
		2010	7,43	6,96	Rp 965.000	Rp 275.057.000.000.000	Rp 9.010
		2011	8,18	3,79	Rp 1.035.500	Rp 314.372.000.000.000	Rp 9.068
		2012	6,28	4,32	Rp 1.200.000	Rp 351.090.000.000.000	Rp 9.638
		2013	6,45	8,38	Rp 1.375.000	Rp 403.933.000.000.000	Rp 12.170
3	Sumatera Barat	2004	12,74	6,4	Rp 480.000	Rp 37.359.000.000.000	Rp 9.283
		2005	13,34	17,11	Rp 540.000	Rp 44.675.000.000.000	Rp 9.830
		2006	11,87	6,6	Rp 650.000	Rp 53.030.000.000.000	Rp 8.994
		2007	10,31	6,59	Rp 725.000	Rp 59.799.000.000.000	Rp 9.393
		2008	8,04	11,06	Rp 800.000	Rp 70.955.000.000.000	Rp 10.900
		2009	7,97	2,41	Rp 880.000	Rp 76.753.000.000.000	Rp 9.425
		2010	6,95	6,96	Rp 940.000	Rp 87.227.000.000.000	Rp 9.010
		2011	8,02	3,79	Rp 1.055.000	Rp 98.967.000.000.000	Rp 9.068
		2012	6,65	4,32	Rp 1.150.000	Rp 110.180.000.000.000	Rp 9.638
		2013	7,02	8,38	Rp 1.350.000	Rp 127.100.000.000.000	Rp 12.170
4	Riau	2004	15,25	6,4	Rp 476.900	Rp 114.246.000.000.000	Rp 9.283
		2005	12,16	17,11	Rp 551.500	Rp 139.019.000.000.000	Rp 9.830
		2006	10,24	6,6	Rp 637.000	Rp 167.068.000.000.000	Rp 8.994
		2007	9,79	6,59	Rp 710.000	Rp 210.003.000.000.000	Rp 9.393
		2008	8,2	11,06	Rp 800.000	Rp 276.400.000.000.000	Rp 10.900

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2009	8,56	2,41	Rp 901.600	Rp 297.173.000.000.000	Rp 9.425
		2010	8,72	6,96	Rp 1.016.000	Rp 345.774.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,09	3,79	Rp 1.120.000	Rp 413.706.000.000.000	Rp 9.068
		2012	4,37	4,32	Rp 1.238.000	Rp 469.073.000.000.000	Rp 9.638
		2013	5,48	8,38	Rp 1.400.000	Rp 522.241.000.000.000	Rp 12.170
5	Jambi	2004	6,04	6,4	Rp 425.000	Rp 18.488.000.000.000	Rp 9.283
		2005	10,74	17,11	Rp 485.000	Rp 22.487.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,62	6,6	Rp 563.000	Rp 26.062.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,22	6,59	Rp 658.000	Rp 32.077.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,14	11,06	Rp 724.000	Rp 41.056.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,54	2,41	Rp 800.000	Rp 44.127.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,39	6,96	Rp 900.000	Rp 53.858.000.000.000	Rp 9.010
		2011	4,63	3,79	Rp 1.028.000	Rp 63.410.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,2	4,32	Rp 1.142.500	Rp 72.634.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,76	8,38	Rp 1.300.000	Rp 85.558.000.000.000	Rp 12.170
6	Sumatera Selatan	2004	8,37	6,4	Rp 460.000	Rp 64.319.000.000.000	Rp 9.283
		2005	12,82	17,11	Rp 503.700	Rp 81.532.000.000.000	Rp 9.830
		2006	9,33	6,6	Rp 604.000	Rp 95.929.000.000.000	Rp 8.994
		2007	9,34	6,59	Rp 662.000	Rp 109.896.000.000.000	Rp 9.393
		2008	8,08	11,06	Rp 743.000	Rp 133.665.000.000.000	Rp 10.900
		2009	7,61	2,41	Rp 824.730	Rp 137.332.000.000.000	Rp 9.425
		2010	6,65	6,96	Rp 927.825	Rp 157.735.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,6	3,79	Rp 1.048.440	Rp 182.390.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,66	4,32	Rp 1.195.220	Rp 206.298.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,84	8,38	Rp 1.630.000	Rp 231.683.000.000.000	Rp 12.170
7	Bengkulu	2004	6,29	6,4	Rp 363.000	Rp 8.105.000.000.000	Rp 9.283
		2005	8,91	17,11	Rp 430.000	Rp 10.134.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,04	6,6	Rp 516.000	Rp 11.397.000.000.000	Rp 8.994
		2007	4,68	6,59	Rp 644.838	Rp 12.874.000.000.000	Rp 9.393
		2008	4,9	11,06	Rp 690.000	Rp 14.916.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,08	2,41	Rp 735.000	Rp 16.385.000.000.000	Rp 9.425
		2010	4,59	6,96	Rp 780.000	Rp 18.600.000.000.000	Rp 9.010
		2011	3,46	3,79	Rp 815.000	Rp 21.242.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,62	4,32	Rp 930.000	Rp 24.119.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,61	8,38	Rp 1.200.000	Rp 27.388.000.000.000	Rp 12.170
8	Lampung	2004	7,38	6,4	Rp 377.500	Rp 36.016.000.000.000	Rp 9.283
		2005	8,47	17,11	Rp 405.000	Rp 40.907.000.000.000	Rp 9.830

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2006	9,13	6,6	Rp 505.000	Rp 49.119.000.000.000	Rp 8.994
		2007	7,58	6,59	Rp 555.000	Rp 60.922.000.000.000	Rp 9.393
		2008	7,15	11,06	Rp 617.000	Rp 73.719.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6,62	2,41	Rp 691.000	Rp 88.935.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,57	6,96	Rp 767.500	Rp 108.404.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,38	3,79	Rp 855.000	Rp 127.908.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,2	4,32	Rp 975.000	Rp 144.639.000.000.000	Rp 9.638
		2013	5,69	8,38	Rp 1.150.000	Rp 164.393.000.000.000	Rp 12.170
9	Kepulauan Bangka Belitung	2004	7,14	6,4	Rp 447.900	Rp 11.797.000.000.000	Rp 9.283
		2005	7,19	17,11	Rp 560.000	Rp 14.172.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,99	6,6	Rp 640.000	Rp 15.921.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,49	6,59	Rp 720.000	Rp 17.895.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,99	11,06	Rp 813.000	Rp 21.421.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6,14	2,41	Rp 850.000	Rp 22.998.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,63	6,96	Rp 910.000	Rp 26.713.000.000.000	Rp 9.010
		2011	3,86	3,79	Rp 1.024.000	Rp 30.484.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,43	4,32	Rp 1.110.000	Rp 34.459.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,65	8,38	Rp 1.265.000	Rp 38.935.000.000.000	Rp 12.170
10	Kepulauan Riau	2004		6,4		Rp 36.737.000.000.000	Rp 9.283
		2005		17,11	Rp 557.000	Rp 40.985.000.000.000	Rp 9.830
		2006	12,24	6,6	Rp 760.000	Rp 46.216.000.000.000	Rp 8.994
		2007	9,01	6,59	Rp 805.000	Rp 51.826.000.000.000	Rp 9.393
		2008	8,01	11,06	Rp 833.000	Rp 58.575.000.000.000	Rp 10.900
		2009	8,11	2,41	Rp 892.000	Rp 63.893.000.000.000	Rp 9.425
		2010	6,9	6,96	Rp 925.000	Rp 71.615.000.000.000	Rp 9.010
		2011	5,38	3,79	Rp 975.000	Rp 80.238.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,08	4,32	Rp 1.015.000	Rp 90.568.000.000.000	Rp 9.638
		2013	5,63	8,38	Rp 1.365.087	Rp 100.310.000.000.000	Rp 12.170
11	DKI Jakarta	2004	14,7	6,4	Rp 671.600	Rp 375.562.000.000.000	Rp 9.283
		2005	15,77	17,11	Rp 711.843	Rp 433.860.000.000.000	Rp 9.830
		2006	11,4	6,6	Rp 819.100	Rp 501.772.000.000.000	Rp 8.994
		2007	12,57	6,59	Rp 900.560	Rp 566.449.000.000.000	Rp 9.393
		2008	12,16	11,06	Rp 972.604	Rp 677.045.000.000.000	Rp 10.900
		2009	12,15	2,41	Rp 1.069.865	Rp 757.697.000.000.000	Rp 9.425
		2010	11,05	6,96	Rp 1.118.009	Rp 861.992.000.000.000	Rp 9.010
		2011	11,69	3,79	Rp 1.290.000	Rp 982.534.000.000.000	Rp 9.068
		2012	9,67	4,32	Rp 1.529.150	Rp 1.103.693.000.000.000	Rp 9.638

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
12	Jawa Barat	2013	8,63	8,38	Rp 2.200.000	Rp 1.255.926.000.000.000	Rp 12.170
		2004	13,69	6,4	Rp 366.500	Rp 305.703.000.000.000	Rp 9.283
		2005	15,53	17,11	Rp 408.260	Rp 389.245.000.000.000	Rp 9.830
		2006	14,59	6,6	Rp 447.654	Rp 473.187.000.000.000	Rp 8.994
		2007	13,08	6,59	Rp 516.840	Rp 526.220.000.000.000	Rp 9.393
		2008	12,08	11,06	Rp 568.193	Rp 633.283.000.000.000	Rp 10.900
		2009	10,96	2,41	Rp 628.191	Rp 689.841.000.000.000	Rp 9.425
		2010	10,33	6,96	Rp 671.500	Rp 771.594.000.000.000	Rp 9.010
		2011	9,96	3,79	Rp 732.000	Rp 862.235.000.000.000	Rp 9.068
		2012	9,08	4,32	Rp 780.000	Rp 949.761.000.000.000	Rp 9.638
13	Jawa Tengah	2013	9,16	8,38	Rp 850.000	Rp 1.070.177.000.000.000	Rp 12.170
		2004	7,72	6,4	Rp 365.000	Rp 193.435.000.000.000	Rp 9.283
		2005	9,54	17,11	Rp 390.000	Rp 234.435.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,02	6,6	Rp 450.000	Rp 281.997.000.000.000	Rp 8.994
		2007	7,7	6,59	Rp 500.000	Rp 312.429.000.000.000	Rp 9.393
		2008	7,35	11,06	Rp 547.000	Rp 367.136.000.000.000	Rp 10.900
		2009	7,33	2,41	Rp 575.000	Rp 397.904.000.000.000	Rp 9.425
		2010	6,21	6,96	Rp 660.000	Rp 444.666.000.000.000	Rp 9.010
		2011	7,07	3,79	Rp 675.000	Rp 498.764.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,61	4,32	Rp 765.000	Rp 556.484.000.000.000	Rp 9.638
14	DI Yogyakarta	2013	6,01	8,38	Rp 830.000	Rp 623.750.000.000.000	Rp 12.170
		2004	6,26	6,4	Rp 365.000	Rp 22.024.000.000.000	Rp 9.283
		2005	7,59	17,11	Rp 400.000	Rp 25.338.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,31	6,6	Rp 460.000	Rp 29.417.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,1	6,59	Rp 500.000	Rp 32.917.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,38	11,06	Rp 586.000	Rp 38.102.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6	2,41	Rp 700.000	Rp 41.407.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,69	6,96	Rp 745.694	Rp 45.626.000.000.000	Rp 9.010
		2011	4,39	3,79	Rp 808.000	Rp 51.785.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,9	4,32	Rp 892.660	Rp 57.032.000.000.000	Rp 9.638
15	Jawa Timur	2013	3,24	8,38	Rp 947.114	Rp 63.690.000.000.000	Rp 12.170
		2004	7,69	6,4	Rp 310.000	Rp 342.706.000.000.000	Rp 9.283
		2005	8,51	17,11	Rp 340.000	Rp 405.042.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,19	6,6	Rp 390.000	Rp 472.287.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,79	6,59	Rp 448.500	Rp 536.982.000.000.000	Rp 9.393
		2008	6,42	11,06	Rp 500.000	Rp 621.392.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,08	2,41	Rp 570.000	Rp 686.848.000.000.000	Rp 9.425

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2010	4,25	6,96	Rp 630.000	Rp 778.564.000.000.000	Rp 9.010
		2011	5,38	3,79	Rp 705.000	Rp 884.503.000.000.000	Rp 9.068
		2012	4,11	4,32	Rp 745.000	Rp 1.001.201.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,3	8,38	Rp 866.250	Rp 1.136.327.000.000.000	Rp 12.170
16	Banten	2004	14,31	6,4	Rp 515.000	Rp 84.825.000.000.000	Rp 9.283
		2005	16,59	17,11	Rp 585.000	Rp 97.170.000.000.000	Rp 9.830
		2006	18,91	6,6	Rp 661.613	Rp 111.845.000.000.000	Rp 8.994
		2007	15,75	6,59	Rp 746.500	Rp 122.844.000.000.000	Rp 9.393
		2008	15,18	11,06	Rp 837.000	Rp 139.865.000.000.000	Rp 10.900
		2009	14,97	2,41	Rp 917.500	Rp 152.556.000.000.000	Rp 9.425
		2010	13,68	6,96	Rp 955.300	Rp 171.748.000.000.000	Rp 9.010
		2011	13,74	3,79	Rp 1.000.000	Rp 192.381.000.000.000	Rp 9.068
		2012	9,94	4,32	Rp 1.042.000	Rp 213.198.000.000.000	Rp 9.638
		2013	9,54	8,38	Rp 1.170.000	Rp 244.548.000.000.000	Rp 12.170
17	Bali	2004	4,66	6,4	Rp 425.000	Rp 30.121.000.000.000	Rp 9.283
		2005	5,32	17,11	Rp 447.500	Rp 35.262.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,04	6,6	Rp 510.000	Rp 38.851.000.000.000	Rp 8.994
		2007	3,77	6,59	Rp 622.000	Rp 44.003.000.000.000	Rp 9.393
		2008	3,31	11,06	Rp 682.650	Rp 51.916.000.000.000	Rp 10.900
		2009	3,13	2,41	Rp 760.000	Rp 60.292.000.000.000	Rp 9.425
		2010	3,06	6,96	Rp 829.316	Rp 67.194.000.000.000	Rp 9.010
		2011	2,95	3,79	Rp 890.000	Rp 74.030.000.000.000	Rp 9.068
		2012	2,1	4,32	Rp 967.500	Rp 83.943.000.000.000	Rp 9.638
		2013	1,83	8,38	Rp 1.181.000	Rp 94.556.000.000.000	Rp 12.170
18	Nusa Tenggara Barat	2004	7,48	6,4	Rp 412.500	Rp 22.146.000.000.000	Rp 9.283
		2005	10,29	17,11	Rp 475.000	Rp 25.683.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,9	6,6	Rp 550.000	Rp 28.597.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,48	6,59	Rp 645.000	Rp 33.522.000.000.000	Rp 9.393
		2008	6,13	11,06	Rp 730.000	Rp 35.315.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6,25	2,41	Rp 832.500	Rp 44.015.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,29	6,96	Rp 890.775	Rp 49.632.000.000.000	Rp 9.010
		2011	5,25	3,79	Rp 950.000	Rp 49.063.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,23	4,32	Rp 1.000.000	Rp 49.680.000.000.000	Rp 9.638
		2013	5,3	8,38	Rp 1.100.000	Rp 56.278.000.000.000	Rp 12.170
19	Nusa Tenggara Timur	2004	4,48	6,4	Rp 400.000	Rp 13.004.000.000.000	Rp 9.283
		2005	4,82	17,11	Rp 450.000	Rp 14.810.000.000.000	Rp 9.830
		2006	3,65	6,6	Rp 550.000	Rp 16.904.000.000.000	Rp 8.994

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2007	3,72	6,59	Rp 600.000	Rp 19.137.000.000.000	Rp 9.393
		2008	3,73	11,06	Rp 650.000	Rp 21.656.000.000.000	Rp 10.900
		2009	3,97	2,41	Rp 725.000	Rp 24.179.000.000.000	Rp 9.425
		2010	3,34	6,96	Rp 800.000	Rp 27.746.000.000.000	Rp 9.010
		2011	3,11	3,79	Rp 850.000	Rp 31.219.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,04	4,32	Rp 925.000	Rp 35.248.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,25	8,38	Rp 1.010.000	Rp 40.465.000.000.000	Rp 12.170
20	Kalimantan Barat	2004	7,9	6,4	Rp 420.000	Rp 29.750.000.000.000	Rp 9.283
		2005	8,13	17,11	Rp 445.200	Rp 34.713.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,53	6,6	Rp 512.000	Rp 38.648.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,47	6,59	Rp 560.000	Rp 43.541.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,41	11,06	Rp 645.000	Rp 49.133.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,44	2,41	Rp 705.000	Rp 54.281.000.000.000	Rp 9.425
		2010	4,62	6,96	Rp 741.000	Rp 60.542.000.000.000	Rp 9.010
		2011	4,6	3,79	Rp 802.500	Rp 66.916.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,54	4,32	Rp 900.000	Rp 74.970.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,99	8,38	Rp 1.060.000	Rp 84.956.000.000.000	Rp 12.170
21	Kalimantan Tengah	2004	5,59	6,4	Rp 482.300	Rp 18.300.000.000.000	Rp 9.283
		2005	4,91	17,11	Rp 523.698	Rp 20.983.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,68	6,6	Rp 634.260	Rp 24.480.000.000.000	Rp 8.994
		2007	5,11	6,59	Rp 665.973	Rp 27.932.000.000.000	Rp 9.393
		2008	4,59	11,06	Rp 765.868	Rp 32.760.000.000.000	Rp 10.900
		2009	4,62	2,41	Rp 873.089	Rp 37.162.000.000.000	Rp 9.425
		2010	4,14	6,96	Rp 986.590	Rp 42.571.000.000.000	Rp 9.010
		2011	3,54	3,79	Rp 1.134.580	Rp 49.048.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,14	4,32	Rp 1.327.459	Rp 55.886.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3	8,38	Rp 1.553.127	Rp 63.515.000.000.000	Rp 12.170
22	Kalimantan Selatan	2004	6,02	6,4	Rp 482.200	Rp 28.028.000.000.000	Rp 9.283
		2005	7,34	17,11	Rp 536.300	Rp 31.794.000.000.000	Rp 9.830
		2006	8,87	6,6	Rp 629.000	Rp 34.670.000.000.000	Rp 8.994
		2007	7,62	6,59	Rp 745.000	Rp 39.439.000.000.000	Rp 9.393
		2008	6,18	11,06	Rp 825.000	Rp 45.844.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6,36	2,41	Rp 930.000	Rp 51.460.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,25	6,96	Rp 1.024.500	Rp 59.823.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,29	3,79	Rp 1.126.000	Rp 68.187.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,19	4,32	Rp 1.225.000	Rp 75.894.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,66	8,38	Rp 1.337.500	Rp 83.362.000.000.000	Rp 12.170

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
23	Kalimantan Timur	2004	10,39	6,4	Rp 572.700	Rp 133.704.000.000.000	Rp 9.283
		2005	11,17	17,11	Rp 600.000	Rp 180.289.000.000.000	Rp 9.830
		2006	13,43	6,6	Rp 701.640	Rp 199.588.000.000.000	Rp 8.994
		2007	12,07	6,59	Rp 766.500	Rp 222.629.000.000.000	Rp 9.393
		2008	11,11	11,06	Rp 889.654	Rp 314.814.000.000.000	Rp 10.900
		2009	10,83	2,41	Rp 955.000	Rp 285.591.000.000.000	Rp 9.425
		2010	10,1	6,96	Rp 1.002.000	Rp 321.764.000.000.000	Rp 9.010
		2011	11,43	3,79	Rp 1.084.000	Rp 391.761.000.000.000	Rp 9.068
		2012	9,02	4,32	Rp 1.177.000	Rp 419.507.000.000.000	Rp 9.638
		2013	7,95	8,38	Rp 1.752.073	Rp 425.429.000.000.000	Rp 12.170
24	Sulawesi Utara	2004	10,91	6,4	Rp 545.000	Rp 16.143.000.000.000	Rp 9.283
		2005	14,05	17,11	Rp 600.000	Rp 18.763.000.000.000	Rp 9.830
		2006	14,62	6,6	Rp 713.500	Rp 21.216.000.000.000	Rp 8.994
		2007	12,35	6,59	Rp 750.000	Rp 24.081.000.000.000	Rp 9.393
		2008	10,65	11,06	Rp 845.000	Rp 28.698.000.000.000	Rp 10.900
		2009	10,56	2,41	Rp 929.500	Rp 33.034.000.000.000	Rp 9.425
		2010	9,61	6,96	Rp 1.000.000	Rp 36.809.000.000.000	Rp 9.010
		2011	10,1	3,79	Rp 1.050.000	Rp 41.831.000.000.000	Rp 9.068
		2012	7,98	4,32	Rp 1.250.000	Rp 47.198.000.000.000	Rp 9.638
		2013	6,79	8,38	Rp 1.550.000	Rp 53.401.000.000.000	Rp 12.170
25	Sulawesi Tengah	2004	5,85	6,4	Rp 450.000	Rp 14.956.000.000.000	Rp 9.283
		2005	7,71	17,11	Rp 490.000	Rp 17.367.000.000.000	Rp 9.830
		2006	10,31	6,6	Rp 575.000	Rp 19.702.000.000.000	Rp 8.994
		2007	8,39	6,59	Rp 615.000	Rp 23.219.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,45	11,06	Rp 670.000	Rp 28.728.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,43	2,41	Rp 720.000	Rp 32.461.000.000.000	Rp 9.425
		2010	4,61	6,96	Rp 777.500	Rp 37.314.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,78	3,79	Rp 827.500	Rp 44.312.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,95	4,32	Rp 885.000	Rp 51.106.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,19	8,38	Rp 995.000	Rp 58.641.000.000.000	Rp 12.170
26	Sulawesi Selatan	2004	15,93	6,4	Rp 455.000	Rp 44.745.000.000.000	Rp 9.283
		2005	15,93	17,11	Rp 510.000	Rp 51.780.000.000.000	Rp 9.830
		2006	12,76	6,6	Rp 612.000	Rp 60.903.000.000.000	Rp 8.994
		2007	11,25	6,59	Rp 673.200	Rp 69.272.000.000.000	Rp 9.393
		2008	9,04	11,06	Rp 740.520	Rp 85.143.000.000.000	Rp 10.900
		2009	8,9	2,41	Rp 905.000	Rp 99.955.000.000.000	Rp 9.425
		2010	8,37	6,96	Rp 1.000.000	Rp 117.862.000.000.000	Rp 9.010

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2011	8,13	3,79	Rp 1.100.000	Rp 137.520.000.000.000	Rp 9.068
		2012	6,01	4,32	Rp 1.200.000	Rp 159.860.000.000.000	Rp 9.638
		2013	5,1	8,38	Rp 1.440.000	Rp 184.783.000.000.000	Rp 12.170
27	Sulawesi Tenggara	2004	9,35	6,4	Rp 470.000	Rp 10.268.000.000.000	Rp 9.283
		2005	10,93	17,11	Rp 498.600	Rp 12.981.000.000.000	Rp 9.830
		2006	9,67	6,6	Rp 573.400	Rp 15.270.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,4	6,59	Rp 640.000	Rp 17.953.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,73	11,06	Rp 700.000	Rp 22.203.000.000.000	Rp 10.900
		2009	4,74	2,41	Rp 770.000	Rp 25.656.000.000.000	Rp 9.425
		2010	4,61	6,96	Rp 860.000	Rp 28.377.000.000.000	Rp 9.010
		2011	4,69	3,79	Rp 930.000	Rp 32.113.000.000.000	Rp 9.068
		2012	4,14	4,32	Rp 1.032.300	Rp 36.601.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,38	8,38	Rp 1.125.207	Rp 40.773.000.000.000	Rp 12.170
28	Gorontalo	2004	12,29	6,4	Rp 430.000	Rp 2.802.000.000.000	Rp 9.283
		2005	14,04	17,11	Rp 435.000	Rp 3.481.000.000.000	Rp 9.830
		2006	7,62	6,6	Rp 527.000	Rp 4.062.000.000.000	Rp 8.994
		2007	7,16	6,59	Rp 560.000	Rp 4.761.000.000.000	Rp 9.393
		2008	5,65	11,06	Rp 600.000	Rp 5.907.000.000.000	Rp 10.900
		2009	5,89	2,41	Rp 675.000	Rp 7.069.000.000.000	Rp 9.425
		2010	5,16	6,96	Rp 710.000	Rp 8.057.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,74	3,79	Rp 762.500	Rp 9.154.000.000.000	Rp 9.068
		2012	4,47	4,32	Rp 837.500	Rp 10.369.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,15	8,38	Rp 1.175.000	Rp 11.752.000.000.000	Rp 12.170
29	Sulawesi Barat	2004		6,4		Rp -	Rp 9.283
		2005		17,11		Rp 4.423.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,45	6,6	Rp 612.000	Rp 5.125.000.000.000	Rp 8.994
		2007	5,45	6,59	Rp 691.464	Rp 6.193.000.000.000	Rp 9.393
		2008	4,57	11,06	Rp 760.500	Rp 8.297.000.000.000	Rp 10.900
		2009	4,51	2,41	Rp 909.400	Rp 9.403.000.000.000	Rp 9.425
		2010	3,25	6,96	Rp 944.200	Rp 10.985.000.000.000	Rp 9.010
		2011	3,35	3,79	Rp 1.006.000	Rp 12.884.000.000.000	Rp 9.068
		2012	2,16	4,32	Rp 1.127.000	Rp 14.408.000.000.000	Rp 9.638
		2013	2,35	8,38	Rp 1.165.000	Rp 16.184.000.000.000	Rp 12.170
30	Maluku	2004	11,67	6,4	Rp 450.000	Rp 4.048.000.000.000	Rp 9.283
		2005	15,01	17,11	Rp 500.000	Rp 4.571.000.000.000	Rp 9.830
		2006	13,72	6,6	Rp 575.000	Rp 5.080.000.000.000	Rp 8.994
		2007	12,2	6,59	Rp 635.000	Rp 5.699.000.000.000	Rp 9.393

N	Provinsi	Periode	Peng (%)	Inflasi (%)	UMR (Rp/bulan)	PDRB (Rp/Tahun)	Nilai Tukar (Rp/US\$)
		2008	10,67	11,06	Rp 700.000	Rp 6.270.000.000.000	Rp 10.900
		2009	10,57	2,41	Rp 775.000	Rp 7.070.000.000.000	Rp 9.425
		2010	9,97	6,96	Rp 840.000	Rp 8.085.000.000.000	Rp 9.010
		2011	10,81	3,79	Rp 900.000	Rp 9.599.000.000.000	Rp 9.068
		2012	7,71	4,32	Rp 975.000	Rp 11.469.000.000.000	Rp 9.638
		2013	9,91	8,38	Rp 1.275.000	Rp 13.245.000.000.000	Rp 12.170
31	Maluku Utara	2004	7,53	6,4	Rp 400.000	Rp 2.369.000.000.000	Rp 9.283
		2005	13,09	17,11	Rp 440.000	Rp 2.583.000.000.000	Rp 9.830
		2006	6,9	6,6	Rp 528.000	Rp 2.818.000.000.000	Rp 8.994
		2007	6,05	6,59	Rp 660.000	Rp 3.160.000.000.000	Rp 9.393
		2008	6,48	11,06	Rp 700.000	Rp 3.862.000.000.000	Rp 10.900
		2009	6,76	2,41	Rp 770.000	Rp 4.691.000.000.000	Rp 9.425
		2010	6,03	6,96	Rp 847.000	Rp 5.390.000.000.000	Rp 9.010
		2011	5,34	3,79	Rp 889.350	Rp 6.039.000.000.000	Rp 9.068
		2012	4,82	4,32	Rp 960.498	Rp 6.918.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,8	8,38	Rp 1.200.622	Rp 7.725.000.000.000	Rp 12.170
32	Papua Barat	2004		6,4		Rp 6.577.000.000.000	Rp 9.283
		2005		17,11		Rp 7.914.000.000.000	Rp 9.830
		2006	10,17	6,6	Rp 822.500	Rp 8.946.000.000.000	Rp 8.994
		2007	9,46	6,59	Rp 987.000	Rp 10.367.000.000.000	Rp 9.393
		2008	7,65	11,06	Rp 1.105.500	Rp 13.975.000.000.000	Rp 10.900
		2009	7,56	2,41	Rp 1.180.000	Rp 18.144.000.000.000	Rp 9.425
		2010	7,68	6,96	Rp 1.210.000	Rp 26.873.000.000.000	Rp 9.010
		2011	6,73	3,79	Rp 1.410.000	Rp 36.176.000.000.000	Rp 9.068
		2012	5,42	4,32	Rp 1.450.000	Rp 43.205.000.000.000	Rp 9.638
		2013	4,4	8,38	Rp 1.720.000	Rp 50.909.000.000.000	Rp 12.170
33	Papua	2004	8	6,4	Rp 650.000	Rp 24.843.000.000.000	Rp 9.283
		2005	7,31	17,11	Rp 700.000	Rp 43.615.000.000.000	Rp 9.830
		2006	5,83	6,6	Rp 822.500	Rp 46.895.000.000.000	Rp 8.994
		2007	5,01	6,59	Rp 987.000	Rp 55.380.000.000.000	Rp 9.393
		2008	4,39	11,06	Rp 1.105.500	Rp 61.516.000.000.000	Rp 10.900
		2009	4,08	2,41	Rp 1.216.100	Rp 76.887.000.000.000	Rp 9.425
		2010	3,55	6,96	Rp 1.316.500	Rp 87.733.000.000.000	Rp 9.010
		2011	5,02	3,79	Rp 1.403.000	Rp 76.501.000.000.000	Rp 9.068
		2012	3,71	4,32	Rp 1.585.000	Rp 77.396.000.000.000	Rp 9.638
		2013	3,15	8,38	Rp 1.710.000	Rp 93.137.000.000.000	Rp 12.170

DESKRIPTIF STATISTIK

Statistics

	N		Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing					
Pengangguran	324	6	7.5968	6.8450	3.27538	1.83	18.91
Inflasi	330	0	7.3620	6.5950	3.98768	2.41	17.11
UMR	325	5	819083.2369	770000.0000	301962.26855	310000.00	2200000.00
PDRB	329	1	140311.2613	51460.1800	219528.41261	2368.87	1255925.78
Nilai_Tukar	330	0	9770.9182	9409.0000	962.22011	8993.50	12170.00

UJI KESESUAIAN MODEL

1. Chow Test dan LM Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	48.371651	(32,287)	0.0000
Cross-section Chi-square	601.103961	32	0.0000

2. Hausmant Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51.697347	4	0.0000

HASIL ESTIMASI

1. Common Effect

Dependent Variable: PENGGRN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 05/21/17 Time: 11:27
Sample: 2004 2013
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (unbalanced) observations: 324

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	116.2009	17.22085	6.747686	0.0000
INF?	0.313028	0.053091	5.896047	0.0000
LN_UMR?	-1.112297	0.572858	-1.941664	0.0531
LN_PDRB?	0.672141	0.119403	5.629175	0.0000
LN_NTKAR?	-11.23569	2.234495	-5.028291	0.0000
R-squared	0.251321	Mean dependent var		7.597133
Adjusted R-squared	0.241933	S.D. dependent var		3.275367
S.E. of regression	2.851765	Akaike info criterion		4.949065
Sum squared resid	2594.288	Schwarz criterion		5.007410
Log likelihood	-796.7485	Hannan-Quinn criter.		4.972353
F-statistic	26.77098	Durbin-Watson stat		0.395901
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Fixed Effect

Dependent Variable: PENGGRN?
Method: Pooled Least Squares

Date: 05/21/17 Time: 11:27
Sample: 2004 2013
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (unbalanced) observations: 324

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.57753	7.731319	9.646159	0.0000
INF?	0.133548	0.024530	5.444202	0.0000
LN_UMR?	0.237878	0.817289	0.291057	0.7712
LN_PDRB?	-3.377869	0.593321	-5.693161	0.0000
LN_NTKAR?	-3.718216	1.037953	-3.582260	0.0004
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	3.027316			
_SUMUT--C	5.972755			
_SUMBAR--C	2.391518			
_RIAU--C	6.385283			
_JAMBI--C	-2.933113			
_SUMSEL--C	3.058483			
_BENGKULU--C	-6.812522			
_LAMPUNG--C	0.410667			
_KEP_BANGKA--C	-5.035078			
_KEP_RIAU--C	0.618225			
_DKI_JAKARTA--C	12.71927			
_JAWA_BARAA--C	12.33982			
_JAWA_TENG--C	5.977303			
_DI_YOGYA--C	-3.427385			
_JAWA_TIM--C	6.689553			
_BANTEN--C	9.755288			
_BALI--C	-4.172002			
_NTB--C	-2.374889			
_NTT--C	-6.980724			
_KALBAR--C	-2.121805			
_KALTENG--C	-4.836372			
_KALSEL--C	-1.929215			
_KALTIM--C	8.332593			
_SULUT--C	0.898930			
_SULTENG--C	-3.547563			
_SULSEL--C	4.067369			
_SULTRA--C	-4.368071			
_GRNTALO--C	-7.841355			
_SULBAR--C	-9.472959			
_MALUKU--C	-3.500139			
_MALUT--C	-9.755634			
_PAPUA_BAR--C	-3.462977			
_PAPUA--C	-2.536114			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.882897	Mean dependent var	7.597133
Adjusted R-squared	0.868209	S.D. dependent var	3.275367
S.E. of regression	1.189060	Akaike info criterion	3.291337
Sum squared resid	405.7788	Schwarz criterion	3.723088

Log likelihood	-496.1965	Hannan-Quinn criter.	3.463668
F-statistic	60.10670	Durbin-Watson stat	1.588958
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect

Dependent Variable: PENGGRN?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/21/17 Time: 11:27
Sample: 2004 2013
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (unbalanced) observations: 324
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	89.28056	7.390715	12.08010	0.0000
INF?	0.127690	0.024318	5.250873	0.0000
LN_UMR?	-3.614864	0.460377	-7.851967	0.0000
LN_PDRB?	-0.237063	0.273592	-0.866482	0.3869
LN_NTKAR?	-3.379505	1.027102	-3.290330	0.0011
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	3.202619			
_SUMUT--C	2.122290			
_SUMBAR--C	1.914445			
_RIAU--C	1.907424			
_JAMBI--C	-1.864267			
_SUMSEL--C	0.652202			
_BENGKULU--C	-3.099438			
_LAMPUNG--C	-1.182951			
_KEP_BANGKA--C	-1.794228			
_KEP_RIAU--C	0.811101			
_DKI_JAKARTA--C	5.975520			
_JAWA_BARA--C	3.673148			
_JAWA_TENG--C	-1.043822			
_DI_YOGYA--C	-2.972230			
_JAWA_TIM--C	-2.293573			
_BANTEN--C	6.924183			
_BALI--C	-4.248319			

_NTB--C	-1.226637
_NTT--C	-4.493973
_KALBAR--C	-2.300263
_KALTENG--C	-2.815429
_KALSEL--C	-1.011862
_KALTIM--C	3.987932
_SULUT--C	3.409464
_SULTENG--C	-1.879516
_SULSEL--C	2.770609
_SULTRA--C	-1.507422
_GRNTALO--C	-1.426554
_SULBAR--C	-3.251599
_MALUKU--C	2.855611
_MALUT--C	-1.823571
_PAPUA_BAR--C	1.299112
_PAPUA--C	-1.270008

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		2.329035	0.7932
Idiosyncratic random		1.189060	0.2068
Weighted Statistics			
R-squared	0.609171	Mean dependent var	1.219384
Adjusted R-squared	0.604270	S.D. dependent var	2.027643
S.E. of regression	1.276047	Sum squared resid	519.4263
F-statistic	124.3033	Durbin-Watson stat	1.286668
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.041587	Mean dependent var	7.597133
Sum squared resid	3321.050	Durbin-Watson stat	0.201240